

MAKNA PEMILU: Ketidakruntutan Arti Penting Pemilu Bagi Pemilih

George Towar Ikbal Tawakkal¹
Irma Fitriana Ulfah¹
Andi Setiawan¹
La Ode Machdani Afala¹
Andrew D Garner²
Thomas R Seitz²

¹Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

²University of Wyoming, Laramie, WY, USA
1000 E University Ave, Laramie, WY 82071, United States

Correspondence Email: george.ikbal@ub.ac.id

Submitted: 08 Sept. 2020, Reviewed: 16 April 2021., Accepted: 30 April 2020

ABSTRACT

Social scientists have offered some ideal concepts of election for voters, including the opportunity for voters to select political officers, and the opportunity to influence government programs or policies. Both are ideally should be the salience of elections for voters, and while social scientists focused on how the salience in practices. Literature gave us two discussion spaces. One, how the salience should be defined in research. Two, cause and effect of the salience on practices. **The question "is this election important to you?" is the type of question commonly used in surveys, and it does not provide a better picture of what respondents are thinking.** This article tries to get involved in the first space and expand the discussion on the second space, so that a better picture is obtained. We define the salience by some variables, not just 'is the election important?'. We employ the meaning of election, usefulness, expectation, and trust. This article uses a survey in Pati and Demak regencies, Central Java, Indonesia, 2019, which generated by an in-depth interview in 2018. We used multistage sampling for 800 respondents, by considering demographics and geographic reasons. By discussing data and concepts, we found incompatibility and inconsistency in how they perceive election. It makes the salience more complicated.

Keywords: salience; election; voter; meaning.

ABSTRAK

Para ilmuwan telah menawarkan konsep pemilu yang ideal bagi pemilih, yang di antaranya adalah kesempatan pemilih untuk mendelegasikan orang untuk menempati jabatan tertentu, dan kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan melalui pilihan-pilihan program atau kebijakan. Kedua hal ini lah yang idealnya menjadi arti penting pemilu bagi pemilih, dan sekaligus menjadi kajian beberapa ilmuwan. Terdapat dua ruang diskusi dalam literatur. Pertama, pendefinisian arti penting dalam penelitian. Kedua, sebab dan akibat dari arti penting pemilu bagi pemilih. **Pendefinisian arti penting pemilu diberbagai artikel disampaikan dengan jenis pertanyaan "apakah pemilu ini penting?", dan hal tersebut tidak dapat memberi gambaran utuh tentang apa yang ada dalam pikiran pemilih. Artikel ini mencoba masuk dalam ruang pertama dan memperluas ruang kedua, sehingga diperoleh gambaran yang lebih baik.** Pendefinisian arti penting dinyatakan dengan melibatkan beberapa variabel, bukan sekedar "apakah pemilu penting?", yakni pemaknaan pemilu, kemanfaatan, harapan, dan kepercayaan terhadap pemilu. Artikel ini didasarkan data survei yang dilakukan di Kabupaten Pati dan Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tahun 2019, dengan mempertimbangkan wawancara mendalam yang telah kami laksanakan pada tahun 2018. Sejumlah

800 responden diambil secara bertingkat dengan mempertimbangkan alasan demografis dan geografis. Dengan mendiskusikan antara data dan konsep, diperoleh pengetahuan bahwa terjadi ketidaktepatan dan ketidakteraturan dalam mempersepsikan pemilu. Hal ini membuat “arti penting” pemilu bagi pemilih semakin rumit untuk dijelaskan.

Kata kunci: arti penting; pemilu; pemilih; makna.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum, atau disebut Pemilu, menjadi salah satu elemen dasar bagi demokrasi. Pemilu yang kompetitif akan menjadi metode seleksi yang menentukan legitimasi demokratis terhadap pengelolaan otoritas publik. Hal tersebut menjadi pembeda dari metode seleksi non-kompetitif. Sifat kompetitif yang melekat pada pemilu akan melegitimasi wakil rakyat untuk mengambil keputusan atas nama rakyat.

Wojtasik menyebutkan, ciri-ciri utama pemilihan dalam sistem demokrasi adalah: ketidakpastian hasil pemilu, dan memungkinkannya pergantian kekuasaan. Sebagai konsekuensinya, warga negara memutuskan kepada siapa dan sejauh mana akan memberikan legitimasi kepada orang-orang terpilih untuk menggunakan kekuasaan atas nama warga negara. Hal yang juga penting adalah, hasil sah pemilu tidak dapat dibatalkan, dan tidak dapat diubah dengan cara lain selain melalui pemilu berikutnya. Oposisi muncul sebagai hasil pemilu, dan diperlukan keberadaannya untuk mengontrol dan memberi alternatif bagi pemerintah. Mengutip pernyataan Andrew Heywood (2000: 200), kebermanfaatan hubungan timbal balik antara warga negara dan mereka yang berkuasa, serta elit dan massa, dipastikan melalui pemilihan [Heywood 2000: 200].

Berbagai literatur menyebutkan fungsi-fungsi pemilu, yang masing-masing menyampaikan tipologi-tipologi yang berbeda menurut pendekatan yang dipakai oleh masing-masing peneliti (Rose, Mossawir 1967; Harrop dan Miller 1987; Katz 1997, 2000; Birch 2001; Dye, Schubert, Zeigler 2009; Medvic 2010; Dalton, Farrell, McAllister 2011; Wojtasik 2013). Salah satu di antara mereka, Wojtasik (2013) menyebutkan tujuh fungsi pemilu, yakni (1) pendelegasian perwakilan politik; (2) pemilihan elit politik; (3) pelegitimasi kekuasaan; (4) pengontrol otoritas; (5) perwujudan akuntabilitas politik; (6) pembentukan program politik; (7) pembentukan ulang opini publik.

Fungsi pendelegasian perwakilan politik memungkinkan pemilih untuk memilih orang-orang yang, menurut pandangan dan nilai-nilai yang dianut, tampak sebagai yang terbaik. Sebagai hasil dari seleksi yang demokratis, orang-orang yang terpilih memiliki legitimasi yang cukup untuk membuat keputusan atas nama publik, dan keputusan yang dihasilkan memiliki nilai legitimasi yang sama. Pendelegasian kepada perwakilan politik, baik eksekutif maupun legislatif, dari seluruh warga negara kepada beberapa orang, secara konsep dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Pertama, pendelegasian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi

pengambilan keputusan. Kedua, pendelegasian bertujuan untuk menyerahkan kewenangan kepada orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan lebih baik dalam pembuatan kebijakan. Ketiga, meningkatkan derajat kepentingan atas kebijakan yang dibuat dan meningkatkan dampak sosialnya.

Pendelegasian perwakilan politik sebagai hasil pemilu dan pengalihan kekuasaan pengambilan keputusan, sejatinya bersandar pada asumsi bahwa pemilih akan memilih orang-orang di antara mereka sendiri, yang memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan (pengetahuan, integritas, kesetiaan terhadap prinsip-prinsip, kemampuan untuk bekerja sama dan mencapai kompromi). Hal yang juga penting, mereka yang terpilih tidak akan membuat keputusan berdasarkan kepentingan diri sendiri, tetapi harus mengedepankan kepentingan publik..

Menurut Wojtasik (2013), seringkali asumsi-asumsi tersebut yang seharusnya ada, justru tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan adanya kebebasan memilih, yang memungkinkan pemilih untuk memilih kandidat tidak berdasar asumsi-asumsi ideal sebagaimana di atas, namun berdasarkan siapa saja yang secara peraturan layak, serta berdasar faktor-faktor di luar asumsi ideal di atas, seperti misal tingkat pengenalan terhadap kandidat, ikatan keluarga dan kemungkinan adanya interaksi sosial di antara mereka sebelum ataupun di masa pemilu..

Bukan sekedar tentang pendelegasian, Medvic (2010: 12) menyatakan bahwa pemilu bukan hanya tentang siapa yang akan memegang jabatan tertentu, namun juga siapa yang dapat

bertindak mewakili rakyat. Dalam rangka mencapai ide bahwa pemilu adalah tentang siapa yang akan mewakili rakyat, maka pemilih perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, jaminan secara politik untuk pengimplementasian program. Kedua, jaminan tersedianya kewenangan untuk mengimplementasikan program. Ketiga, tersedianya pilihan-pilihan kandidat atau program yang kompetitif. Artinya, pemilih perlu memastikan bahwa orang-orang yang dipilihnya memiliki kesempatan untuk menjalankan program.

Pemilih juga bertanggungjawab untuk memastikan kebijakan yang akan diambil oleh pejabat yang dipilihnya. V.O Key (1966) menyampaikan dalam karyanya yang berjudul *The Responsible Electorate*, bahwa pemilih bertanggungjawab untuk menentukan alternatif-alternatif kebijakan dari beberapa kebijakan yang ditawarkan oleh kandidat. Lee dkk (2004) menyampaikan dua kemungkinan peran pemilih dalam menentukan kebijakan. Pertama, pemilih mempengaruhi pilihan kebijakan yang ditawarkan oleh kandidat di pemilu.

Dengan kata lain, pemilih memiliki pengaruh dalam tataran penentuan program kampanye yang akan ditawarkan oleh kandidat. Kedua, pemilih memilih kebijakan yang ditawarkan oleh kandidat. Dengan kata lain, pemilih sekedar memilih program-program yang ditawarkan oleh kandidat. Perbedaan antara yang pertama dan kedua terletak pada fase pengaruh. Peran yang pertama, pemilih menjadi pertimbangan bagi kandidat untuk membuat program. Peran yang kedua, pemilih menjadi penentu atas kelayakan program

yang ditawarkan, dalam wujud memilih kandidat tersebut.

Rose and Mossawir (1967) menyampaikan enam fungsi pemilu bagi pemilih. Pertama, pemilu adalah kesempatan untuk melakukan suksesi kepemimpinan (pejabat). Kedua, pemilu adalah kesempatan untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Ketiga, pemilu adalah kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Keempat, pemilu adalah kesempatan untuk melegitimasi pemerintahan. Kelima, pemilu adalah kesempatan untuk menolak pemerintahan yang ada. Keenam, pemilu dilihat sebagai sesuatu yang tidak memiliki fungsi, yakni ketika pemilih tidak memposisikan pemilu sebagai sesuatu yang mempengaruhi sistem politik. Artinya, pemilih idealnya menganggap kebijakan sebagai daya tarik pemilu.

Dari pembahasan fungsi pemilu sebagaimana di atas, dapat ditarik dua gambaran besar, bahwa pemilu adalah memilih orang, dan sekaligus memperjuangkan kebijakan. Dua hal tersebut idealnya saling berkaitan, dan tidak bisa melupakan salah satunya. Artinya, pemilih seharusnya melihat dua fungsi tersebut sebagai daya tarik pemilu. Namun, konsep ideal tersebut pada kenyataannya dipraktekkan secara berbeda-beda.

Kajian-kajian tentang daya tarik atau arti penting pemilu bagi pemilih menunjukkan bahwa terjadi dinamika yang tidak dapat diseragamkan, dan telah menjadi perhatian berbagai kalangan peneliti. Bahkan, terjadi perdebatan mengenai pemaknaan “arti penting” (saliency) di antara para peneliti. Secara tradisional, kata tersebut merujuk pada arti penting suatu isu,

khususnya bagi pemilih. Kata “arti penting” juga dapat merujuk pada hal-hal lainnya, seperti misal karakteristik kandidat bagi pemilih. Secara sederhana, “arti penting” merujuk pada bobot yang dilekatkan oleh individu terhadap informasi politik, yang kemudian menentukan kecenderungan individu untuk menentukan sikap politik.

Beberapa ilmuwan menggunakan kata “arti penting” sebagai “prominence”, yakni sejauh mana informasi tertentu menjadi paling penting dalam pikiran seseorang (Taylor and Fiske, 1978). Definisi tersebut tidak sepenuhnya disetujui, karena “prominence” tidak selalu bermakna “penting”. Keduanya adalah hal yang berbeda, meskipun informasi penting akan cenderung menjadi sesuatu yang “prominence”. Namun setidaknya pendefinisian “arti penting” sebagai prominence, tetap memiliki manfaat pada kasus tertentu. Bahkan di beberapa kajian, penggunaan kata “arti penting” tidak didefinisikan dengan jelas (Epstein and Segal, 2000).

Meskipun tidak ada pendefinisian yang jelas, namun ada “kesepakatan” di antara para ilmuwan untuk mendefinisikan “arti penting” di penelitian perilaku politik, sebagai variabel yang fungsional, seperti misal penggunaan pertanyaan pada kuesioner dengan kalimat “masalah paling penting yang dihadapi bangsa”. Jawaban atas pertanyaan itu dapat dimaknai sebagai “arti penting”. Ketika responden menjawab “infrastruktur”, maka dapat diartikan bahwa infrastruktur adalah masalah paling penting, dan masalah tersebut adalah penting (salient) bagi responden. Paling tidak, dapat diartikan sebagai masalah yang lebih penting diantara masalah-masalah yang

lain. Bila semakin banyak yang menjawab “infrastruktur”, artinya masalah tersebut semakin layak dilihat sebagai masalah publik.

Pendefinisian “arti penting” secara fungsional tersebut, kenyataannya tidak menyelesaikan permasalahan terminologi, seperti misal dalam menjawab “masalah apa yang paling penting”. Wlezien (2005) mengajukan beberapa hal untuk dipertimbangkan ketika menafsiri “arti penting”, yakni On Importance, dan Important Problem. Bayangkan ketika seseorang diberikan pertanyaan sebagaimana di atas, dan menjawab “infrastruktur”. Dalam bentuk “On Importance”, jawaban tersebut dapat ditafsirkan dalam berbagai kesimpulan. Jawaban orang tersebut dapat ditafsirkan sebagai masalah penting bagi seluruh masyarakat, masalah penting bagi kelompok mereka sendiri, masalah jangka panjang yang menjadi kepedulian, atau bisa ditafsirkan sebagai masalah jangka pendek yang menjadi kepeduliannya. Hal ini menjadi permasalahan sendiri bagi peneliti untuk menafsirkan jawaban responden. Intinya, “arti penting” dimaknai sebagai masalah bersama atau masalah publik yang dianggap penting, atau setidaknya bukan masalah bagi orang tersebut. Lain halnya dengan “Important Problem”, dimaknai sebagai arti penting suatu masalah bagi individu. Ketika seseorang menjawab “infrastruktur”, maka dapat diartikan sebagai kebutuhan paling penting yang diharapkan oleh orang tersebut. Terdapat asas kemanfaatan pribadi ketika seseorang menjawab suatu masalah sebagai “penting”.

Terlepas dari bagaimana “arti penting” didefinisikan dan ditafsiri, terdapat

beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini. Berangkat dari argumen Franklin (2001) kiranya dapat dijadikan sebagai pintu masuk pentingnya variabel “arti penting” dalam studi kepemiluan, khususnya perilaku memilih. Franklin (2001) mengajukan argumen terkait hubungan persepsi pemilih terhadap isu yang ada di pemilu tertentu, terhadap partisipasi pemilih. Dalam penelitiannya, Franklin menyimpulkan bahwa pemilih yang menganggap suatu pemilu itu penting bagi dirinya, maka akan cenderung berpartisipasi di pemilu tersebut. Argumen Franklin ini menjadi pintu masuk bagi peneliti lain untuk menjelaskan lebih detail tentang hubungan arti penting suatu pemilu bagi pemilih, terhadap berbagai variabel.

Seperti misal Bellucci dan Heat (2007), yang meneliti persepsi pemilih tentang arti penting suatu pemilu, dan pembelahan sosial. Kemudian, Orford, dkk (2009), yang mengukur hubungan persepsi pemilih tentang arti penting suatu pemilu, terhadap partisipasi dan jarak tempuh ke tempat pemungutan suara. Gorecki (2011) melakukan studi terkait persepsi pemilih tentang arti penting suatu pemilu dan pelaporan yang berlebihan terhadap tingkat partisipasi pemilu. Begitu juga Dragu dan Fan (2016), yang meneliti tentang persepsi pemilih tentang arti penting suatu pemilu dan tingkat kompetisi partai di pemilu.

Kesimpulan dari kajian-kajian di atas adalah, ketika secara konsep pemilu memiliki daya tarik sebagai kesempatan memilih pejabat dan kesempatan memperjuangkan kebijakan, maka idealnya pemilih akan melihat pemilu tersebut sebagai sesuatu yang penting, dan kedua fungsi tersebut sebagai arti penting pemilu.

Sementara terjadi perdebatan ketika pemilih menjawab tentang “sesuatu yang penting”, apakah penting dalam konteks kebutuhan masyarakat bersama, ataukah penting dalam konteks kebutuhan pribadi pemilih, beberapa penelitian terbaru mengkaji “arti penting” dari sisi apa yang membuatnya penting (lihat Belucci dan Heat, 2007; Orford, 2009; Dragu dan Fan, 2016), serta apa akibatnya terhadap tingkat partisipasi (lihat Franklin, 2001; Gorecki, 2011). Hal ini mengindikasikan terdapatnya kekosongan penjelasan mengenai nilai-nilai yang bergerak di seputar “arti penting”, yang juga membentuk persepsi pemilih secara komprehensif mengenai arti penting suatu pemilu.

Nilai-nilai yang bergerak di seputar “arti penting” yang dimaksud di sini adalah di luar perdebatan para ilmuwan mengenai “penting bagi siapa”, sebagaimana dipaparkan di atas. Dalam logika sederhana, apakah kesimpulan arti penting dapat dicapai hanya dengan satu pernyataan pemilih bahwa “pemilu itu penting”? Merujuk pada argumen Medvic (2010), apakah pemilih menyadari bahwa pemilu tersebut dapat memenuhi persepsi arti penting si pemilih?

Dibutuhkan pemahaman lanjutan untuk menyimpulkan bahwa pemilih benar menganggap pemilu tersebut penting, seperti misal persepsi terhadap kebermanfaatan dan kepercayaan. Dengan mempertimbangkan kekosongan penjelasan tersebut, artikel ini akan mengkaji “arti penting” pemilu bagi pemilih, dengan mendiskusikan berbagai persepsi pemilih tentang pemilu. Pelibatan berbagai persepsi diharapkan dapat memberikan penjelasan secara

komprehensif mengenai “arti penting” pemilu bagi pemilih.

METODE

Dalam rangka mendiskusikan rumusan di atas, artikel ini menggunakan data survei yang dilaksanakan di pedesaan-pedesaan di Kabupaten Pati dan Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tahun 2019. Berdasar data tahun 2019, jumlah pemilih di Kabupaten Demak adalah 860.945 orang (KPU Kabupaten Demak, 2019), sedangkan di Kabupaten Pati adalah 1.025.928 orang (Murianews.com, 2018). Dengan rumus Slovin, dan membulatkan N sebesar 1.000.000 pemilih, *margin of error* sebesar 5%, maka masing-masing Kabupaten diperoleh angka sampel sebesar 400 responden. Pemilihan responden dilakukan secara bertingkat, dengan mempertimbangkan karakteristik demografis dan geografis masyarakat, seperti misal jarak kecamatan dengan pusat kabupaten, jarak desa dengan pusat kecamatan, jarak RT/RW dengan pusat pemerintahan desa, serta karakteristik tingkat ekonomi, pendidikan, dan agama masyarakat suatu desa. Survei ini merupakan kelanjutan dari wawancara mendalam tahun 2018, yang menginformasikan bahwa pemilu dimaknai dengan berbagai cara oleh pemilih, seperti misal sebagai kompetisi, pesta rakyat, pembagian uang, dan lain sebagainya. Berdasar penelitian awal tersebut, kami membangun survei tahun 2019.

Pembahasan dalam artikel ini terdiri dari beberapa bagian, yang mencerminkan alur berpikir penarikan argumen. Pertama, makna pemilu bagi pemilih. Variabel ini diperlukan sebagai dasar untuk melacak

persepsi pemilih terhadap variabel-variabel lain. Kedua, kebermanfaatan pemilu. Setelah mengetahui apa makna pemilu bagi pemilih, bagian kedua akan melihat apakah pemilu bermanfaat bagi pemilih.

Ketiga, harapan dan kepercayaan terhadap pemilu. Jawaban pemilih atas kebermanfaatan pemilu, dapat diperoleh pemahaman lebih dalam dengan mempertanyakan apa yang diharapkan oleh pemilih dari pemilu, dan apakah pemilih percaya bahwa harapan tersebut dapat terpenuhi melalui pemilu. Keempat, dan sekaligus kesimpulan, akan mendiskusikan variabel-variabel di atas dan kajian-kajian yang telah ada, keterbatasan, dan peluang riset selanjutnya

HASIL DAN DISKUSI

Pemaknaan Pemilu

Pembahasan hasil dalam artikel ini diawali dengan menyajikan data survei tentang makna pemilu bagi pemilih. Responden diberikan serangkaian pilihan jawaban mengenai makna pemilu, yakni kompetisi antar partai politik/ calon; kegiatan politik rutin; pesta rakyat; kesempatan memilih pemimpin / wakil rakyat; pembagian uang; kesempatan mencari kehidupan yang lebih baik; serta pemborosan uang negara. Responden juga diberikan keleluasaan untuk menyebutkan jawaban di luar pilihan tersebut. Data statistik menunjukkan angka-angka sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Pemaknaan Pemilu

	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kompetisi	21.9	21.9	21.9
Kegiatan Rutin	5.3	5.3	27.1
Pesta	10.3	10.3	37.4
Memilih	45.8	45.8	83.1
Uang	2.6	2.6	85.8
Hidup Lebih Baik	8.0	8.0	93.8
Pemborosan	5.3	5.3	99.0
Tidak Menjawab	1.0	1.0	100.0
Total	100.0	100.0	

Sebanyak 21,9% responden mempersepsikan pemilu sebagai arena kompetisi antar partai/ kandidat. Sebanyak 5,3% responden mempersepsikan pemilu sebagai kegiatan rutin politik. Sebanyak 10,3% responden mempersepsikan pemilu sebagai pesta rakyat. Sebanyak 45,8% responden mempersepsikan pemilu sebagai kesempatan memilih pemimpin atau wakil

rakyat, yang kemudian dapat diartikan sebagai kesempatan memilih pejabat pemerintahan. Sebanyak 2,6% responden mempersepsikan pemilu sebagai ajang pembagian uang. Sebanyak 8,0% responden mempersepsikan pemilu sebagai kesempatan mencari kehidupan yang lebih baik. Sebanyak 5,3% responden mempersepsikan pemilu sebagai

pemborosan uang negara. Sedangkan 1% responden memilih untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa reponden terbanyak memaknai pemilu sebagai kesempatan memilih pemimpin. Hal ini secara sederhana tidak bertentangan dengan konsep fungsi pemilu yang disampaikan oleh Wojtasik (2013), yang menyebutkan salah satu fungsi pemilu, yakni pendelegasian perwakilan politik. Pendelegasian dalam bahasa responden sebanding dengan kesempatan memilih pejabat. 8,0% responden yang menjawab kesempatan untuk memperbaiki kehidupan, juga sejalan dengan konsep pemilu sebagai sarana perjuangan kepentingan bagi pemilih sebagaimana disampaikan oleh Medvic (2010) tentang pemilu sebagai pemilihan pejabat yang memiliki potensi mewujudkan kepentingan pemilih. Namun, terdapat 23,5% responden yang mempersepsikan pemilu di luar konsep tersebut, seperti misal sebagai pemborosan uang negara,

pembagian uang, pesta rakyat, dan sekedar kegiatan politik rutin.

Kemanfaatan Pemilu

Setelah mengetahui persepsi responden tentang apa makna pemilu, perlu ditelusuri lebih jauh mengenai apakah persepsi responden tersebut didasari oleh persepsi kemanfaatan pemilu. Dengan kata lain, ketika responden mempersepsikan pemilu sebagai kesempatan memilih pejabat, apakah responden meyakini bahwa pemilu bermanfaat. Pada bagian ini akan didahului dengan penyajian data statistik persepsi responden terhadap kemanfaatan pemilu, dan kemudian data silang mengenai makna pemilu dan kemanfaatan pemilu. Kebermanfaatan pemilu merujuk pada pertanyaan apakah pemilu bermanfaat bagi responden. Responden diberikan empat pilihan jawaban, yang masing-masing memiliki nilai tingkatan, yakni sangat bermanfaat, bermanfaat, tidak bermanfaat, dan sangat tidak bermanfaat. Data statistik menunjukkan angka-angka sebagaimana tabel 2.

Tabel 2. Kemanfaatan Pemilu

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Bermanfaat	29.0	29.0	29.0
	Bermanfaat	65.0	65.0	94.0
	Tidak Bermanfaat	6.0	6.0	100.0
	Total	100.0	100.0	

Sebanyak 29,0% responden mempersepsikan pemilu sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat. Sebanyak 65,0% responden mempersepsikan pemilu sebagai sesuatu yang bermanfaat. Hanya 6,0% responden yang mempersepsikan pemilu sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat, dan tidak ada yang menjawab sangat tidak bermanfaat. Angka-angka ini menunjukkan

bahwa 94,0% responden memandang positif terhadap pemilu sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi responden. Angka ini terkesan aneh ketika merujuk pada persepsi tentang makna pemilu, dimana terdapat jawaban yang secara konsep tidak sejalan dengan konsep-konsep pemilu yang disampaikan Wojtasik (2013) dan Medvic (2010). Keduanya secara tersirat

memberikan gambaran tentang pemilu yang bermanfaat adalah pemilu yang memiliki fungsi pendelegasian kandidat dan mampu menjadi arena perjuangan kepentingan pemilih.

Untuk melihat lebih detail tentang keanehan tersebut, diperlukan data silang yang mempertemukan persepsi tentang makna, dan persepsi tentang kemanfaatan. Persilangan data tersebut dibutuhkan untuk

melihat responden yang mempersepsikan makna pemilu sebagai apakah yang mempersepsikan pemilu sebagai sesuatu yang bermanfaat. Begitu pula sebaliknya, responden yang mempersepsikan makna pemilu sebagai apakah yang mengisi 6,0% responden yang menjawab pemilu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Data silang kedua variabel tersebut sebagaimana tabel 3.

Tabel 3. Data Silang Pemaknaan Pemilu dan Kemanfaatan Pemilu
% within Kemanfaatan Pemilu

		Kemanfaatan Pemilu			Total
		Sangat Bermanfaat	Bermanfaat	Tidak Bermanfaat	
Pemaknaan Pemilu	Kompetisi	32.8%	17.3%	18.8%	21.9%
	Kegiatan Rutin		8.1%		5.3%
	Pesta	3.9%	10.4%	39.6%	10.3%
	Memilih	46.6%	49.6%		45.8%
	Uang	4.7%	1.9%		2.6%
	Hidup Lebih Baik	12.1%	6.9%		8.0%
	Pemborosan		4.2%	41.7%	5.3%
	Tidak Menjawab		1.5%		1.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Data silang menunjukkan bahwa dari 100,0% responden yang menjawab pemilu tidak bermanfaat, 41,0% nya adalah responden yang mempersepsikan pemilu sebagai pemborosan uang negara, 39,6% nya adalah responden yang mempersepsikan pemilu sebagai pesta rakyat. Angka ini masih tergolong wajar secara logika, bahwa ketika responden mempersepsikan pemilu di luar konsep yang diajukan oleh para ahli (dalam hal ini seperti misal dikemukakan Wojtasik, 2013,

dan Medvic, 2010), memiliki konsekuensi persepsi bahwa pemilu tidak bermanfaat. Namun, angka lain menunjukkan bahwa 18,8% responden yang menjawab pemilu tidak bermanfaat adalah responden yang mempersepsikan pemilu sebagai kompetisi antar partai atau kandidat. Hal ini terkesan anomali, dan merupakan sesuatu yang perlu dipertanyakan, mengingat fungsi kompetisi dalam pendelegasian perwakilan atau pejabat merupakan fungsi positif pemilu,

dan itu sesuai konsep harusnya sesuatu yang bermanfaat.

Tabel 4. Data Silang Kemanfaatan Pemilu dan Pemaknaan Pemilu
% within Pemaknaan Pemilu

		Pemaknaan Pemilu								Total
		Kompetisi	Kegiatan Rutin	Pesta	Memilih	Uang	Hidup Lebih Baik	Pemborosan	Tidak Menjawab	
Kemanfaatan Pemilu	Sangat Bermanfaat	43.4%		11.0%	29.5%	52.4%	43.8%			29.0%
	Bermanfaat	51.4%	100.0%	65.9%	70.5%	47.6%	56.3%	52.4%	100.0%	65.0%
	Tidak Bermanfaat	5.1%		23.2%				47.6%		6.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Bentuk lain data silang (Tabel 4) yang mempertemukan variabel pemaknaan pemilu dan kemanfaatan pemilu menunjukkan bahwa 18,8% responden tersebut adalah 5,1% dari total jumlah responden yang mempersepsikan pemilu sebagai kompetisi antar partai atau kandidat. Artinya, responden yang berkontribusi pada ketidakrunutan di atas, jumlahnya kecil. Namun, data silang ini justru menampilkan data yang tidak kalah untuk dipertanyakan. 100% responden yang memaknai pemilu sebagai pembagian uang, justru menganggap pemilu sebagai sesuatu yang bermanfaat. 76,0% responden yang mempersepsikan pemilu sebagai pesta rakyat, justru mempersepsikan pemilu sebagai sesuatu yang bermanfaat dan sangat bermanfaat. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep fungsi pemilu, yang tidak menyebutkan fungsi pesta sebagai fungsi ideal pemilu.

Bukan hanya itu, meskipun perbedaannya tidak besar, 52,4% responden yang mempersepsikan pemilu sebagai pemborosan uang negara, juga mempersepsikan pemilu sebagai sesuatu

yang bermanfaat. Kesimpulan dari data silang variabel pemaknaan pemilu dan kemanfaatan pemilu menunjukkan adanya ketidakrunutan antar persepsi bila dinilai menggunakan konsep fungsi pemilu, khususnya pada responden yang secara konsep tidak memaknai pemilu secara positif.

Harapan dan Kepercayaan

Ketidakrunutan yang ditunjukkan dalam pembahasan di atas, memunculkan konsekuensi logis berupa pertanyaan berikut. Ketika responden memiliki persepsi tertentu tentang makna dan kemanfaatan pemilu, khususnya responden yang berkontribusi pada ketidakcocokan di atas, sebenarnya apa yang responden harapkan dari adanya pemilu?. Bagian ini akan mendiskusikan data statistik yang berhubungan dengan pertanyaan tersebut.

Sebagai awal, akan disajikan data tentang harapan responden terhadap pemilu. Responden diberikan pertanyaan, “apa harapan anda dengan adanya pemilu?”. Responden diberikan beberapa pilihan jawaban, yakni: pembangunan infrastruktur

(jalan, dll); pendidikan yang lebih baik; perbaikan layanan kesehatan; perbaikan ekonomi; pergantian pemimpin/dewan yang lebih baik; mendapatkan uang dari calon; membantu calon mencarikan suara;

tidak mengharapkan apapun; serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Responden juga diberi hak untuk menjawab di luar pilihan tersebut.

Tabel 5. Harapan Pemilu

	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Infrastruktur	14.4	14.4	14.4
Pendidikan	10.4	10.4	24.8
Layanan Kesehatan	8.8	8.8	33.5
Ekonomi	49.1	49.1	82.6
Pergantian Pejabat	16.0	16.0	98.6
Membantu Kandidat	1.4	1.4	100.0
Total	100.0	100.0	

Sebanyak 14,4% responden (Tabel 5) mengharapkan pemilu dapat menghasilkan pembangunan infrastruktur. Sebanyak 10,4% responden mengharapkan pemilu dapat menghasilkan pendidikan yang lebih baik. Sebanyak 8,8% responden mengharapkan pemilu dapat menghasilkan perbaikan layanan kesehatan. Sebanyak 49,1% responden mengharapkan pemilu dapat menghasilkan perbaikan ekonomi. Sebanyak 16,0% responden mengharapkan pemilu dapat menghasilkan pergantian pemimpin atau dewan (pejabat). Sebanyak 1,4% responden berharap dapat membantu kandidat di pemilu. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mengharapkan pemilu dapat menjadi sarana yang positif bagi kesejahteraan. Merujuk pada konsep yang disampaikan Medvic (2010), bahwa pemilu merupakan sarana perjuangan kepentingan pemilih, maka dapat dikatakan

bahwa responden mempertimbangkan nilai substantif ketika berharap pada pemilu. Meskipun terdapat sekitar 17,4% responden yang di luar nilai substantif, tetapi angka tersebut tergolong kecil.

Besarnya harapan terpenuhinya kepentingan-kepentingan yang bersifat substantif pada pemilu, kemudian memunculkan pertanyaan, apakah harapan ini berbanding lurus dengan pemaknaan pemilu? Dengan kata lain, apakah pemilih yang memaknai pemilu sejalan dengan konsep fungsi pemilu, memiliki harapan yang bersifat substantif? Begitu juga sebaliknya, apakah terdapat pemilih yang tidak memaknai pemilu sejalan dengan konsep fungsi pemilu, namun memiliki harapan yang bersifat substantif?. Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, diperlukan data silang (Tabel 6) yang mempertemukan variabel

Vol.7, No.1, 2021
Doi: 10.24198/cosmogov.v7i1.29269
<http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/index>

pemaknaan pemilu dan harapan terhadap pemilu.

Tabel 6. Data Silang Pemaknaan Pemilu dan Harapan Pemilu
% within Pemaknaan Pemilu

		Harapan Pemilu						Total
		Infrastruktur	Pendidikan	Layanan Kesehatan	Ekonomi	Pergantian Pejabat	Membantu Kandidat	
Pemaknaan Pemilu	Kompetisi	22.3%	17.7%	5.7%	49.1%	5.1%		100.0%
	Rutinitas		26.2%		26.2%	21.4%	26.2%	100.0%
	Pesta	35.4%	11.0%		53.7%			100.0%
	Memilih	7.7%	8.7%	10.4%	45.9%	27.3%		100.0%
	Uang			52.4%	47.6%			100.0%
	Hidup Lebih Baik	29.7%			70.3%			100.0%
	Pemborosan			26.2%	50.0%	23.8%		100.0%
	Tidak Menjawab				100.0%			100.0%
Total		14.4%	10.4%	8.8%	49.1%	16.0%	1.4%	100.0%

Sebagai catatan, pembangunan infrastruktur, pendidikan yang lebih baik, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan ekonomi, adalah harapan yang bersifat substantif. Data silang antara pemaknaan pemilu dan harapan terhadap pemilu menunjukkan bahwa mayoritas responden (94,9%) yang memaknai pemilu sebagai kompetisi antar partai atau kandidat, memiliki harapan yang bersifat substantif terhadap pemilu. Sebanyak sekitar 52% responden yang memaknai pemilu sebagai kegiatan politik rutin, memiliki harapan yang bersifat substantif terhadap pemilu.

Sebanyak 100,0% responden yang memaknai pemilu sebagai pesta rakyat, memiliki harapan yang bersifat substantif terhadap pemilu. Sebanyak sekitar 72% responden yang memaknai pemilu sebagai kesempatan memilih pemimpin (pejabat), memiliki harapan yang bersifat substantif terhadap pemilu. Sebanyak 100,0% responden yang memaknai pemilu sebagai pembagian uang, memiliki harapan yang

bersifat substantif terhadap pemilu. Sebanyak 100,0% responden yang memaknai pemilu sebagai perbaikan hidup, memiliki harapan yang bersifat substantif terhadap pemilu. Sebanyak sekitar 76% responden yang memaknai pemilu sebagai pemborosan uang negara, memiliki harapan yang bersifat substantif terhadap pemilu.

Data tersebut menunjukkan adanya ketidakrunutan pola pikir pada responden, yakni ketika memaknai pemilu di luar konsep fungsi pemilu, namun memiliki harapan yang bersifat substantif pada pemilu. Seperti misal, reponden yang memaknai pemilu sebagai pembagian uang, lazimnya tidak memiliki harapan yang bersifat substantif pada pemilu. Namun data menunjukkan sebaliknya, yakni 100% memiliki harapan yang bersifat substantif. Begitu juga responden yang memaknai pemilu sebagai pemborosan uang negara, juga mayoritas memiliki harapan yang bersifat substantif pada pemilu.

Kembali pada besarnya harapan terpenuhinya kepentingan-kepentingan yang bersifat substantif pada pemilu, kemudian memunculkan pertanyaan, apakah pemilih percaya bahwa kandidat yang dipilihnya dapat memenuhi harapan tersebut? Pertanyaan ini penting, untuk melihat kepercayaan diri pemilih ketika berharap pada pemilu. Kepercayaan

terhadap terpenuhinya harapan, dioperasionalkan dalam pertanyaan, “apakah anda yakin bahwa calon-calon pilihan anda akan dapat memenuhi harapan anda tersebut?”. Responden diberikan empat pilihan jawaban, yakni: sangat yakin, yakin, tidak yakin, dan sangat tidak yakin. Data kepercayaan sebagaimana ditampilkan di tabel 7.

Tabel 7. Kepercayaan terhadap Terpenuhinya Harapan

	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Percaya	11.3	11.3	11.3
Percaya	64.8	64.8	76.0
Tidak Percaya	21.3	21.3	97.3
Sangat Tidak Percaya	1.4	1.4	98.6
Tidak Menjawab	1.4	1.4	100.0
Total	100.0	100.0	

Sebanyak 11,3% responden sangat percaya bahwa kandidat yang dipilihnya mampu memenuhi harapan responden. Sebanyak 64,8% responden percaya bahwa kandidat yang dipilihnya mampu memenuhi harapan responden. Sebanyak 21,3% responden tidak percaya bahwa kandidat yang dipilihnya mampu memenuhi harapan responden. Sebanyak 1,4% responden sangat tidak percaya bahwa kandidat yang dipilihnya mampu memenuhi harapan responden. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden (76,1%) memiliki pandangan positif (percaya dan sangat percaya) terhadap kemampuan kandidat yang dipilihnya untuk memenuhi harapan.

Bila dikaitkan dengan harapan, maka dapat disimpulkan bahwa responden memiliki harapan dan kepercayaan yang positif terhadap pemilu. Namun, secara umum, bila dikaitkan dengan kemanfaatan pemilu, terdapat perbedaan angka cukup besar (sekitar 18%) antara responden yang menganggap pemilu bermanfaat (sekitar 94%), dan responden yang percaya terpenuhinya harapan (sekitar 76%). Hal ini tentu menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan, mengingat lazimnya ketika responden menganggap pemilu bermanfaat, maka akan percaya terpenuhinya harapan. Namun kenyataannya terdapat perbedaan sekitar 18% responden.

Tabel 8. Data Silang Kemanfaatan dan Kepercayaan

% within Kemanfaatan

		Kepercayaan terhadap Terpenuhinya Harapan					Total
		Sangat Percaya	Percaya	Tidak Percaya	Sangat Tidak Percaya	Tidak Menjawab	
Kemanfaatan Pemilu	Sangat Bermanfaat	25.9%	52.2%	22.0%			100.0 %
	Bermanfaat	4.0%	72.7%	19.0%	2.1%	2.1%	100.0 %
	Tidak bermanfaat	18.8%	39.6%	41.7%			100.0 %
Total		11.3%	64.8%	21.3%	1.4%	1.4%	100.0 %

Penjelasan lebih detail tentang perbedaan tersebut dapat merujuk pada data silang (Tabel 8) yang mempertemukan variabel kemanfaatan pemilu dan kepercayaan. Sebanyak 25,9% responden yang mempersepsikan pemilu sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat, sangat percaya bahwa kandidat yang dipilihnya mampu mewujudkan harapan. Sebanyak 52,2% responden yang mempersepsikan pemilu sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat, percaya bahwa kandidat yang dipilihnya mampu mewujudkan harapan. Namun terdapat 22,0% responden yang mempersepsikan pemilu sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat, tidak percaya bahwa kandidat yang dipilihnya mampu mewujudkan harapan. Dari responden yang menyatakan pemilu sangat bermanfaat ini, secara logis terdapat ketidakrunutan berpikir sebesar 22,0% responden.

Selanjutnya, sebanyak 4,0% responden yang mempersepsikan pemilu

sebagai sesuatu yang bermanfaat, sangat percaya bahwa kandidat yang dipilihnya mampu mewujudkan harapan. Sebanyak 72,7% responden yang mempersepsikan pemilu sebagai sesuatu yang bermanfaat, percaya bahwa kandidat yang dipilihnya mampu mewujudkan harapan. Namun, ada sebanyak 19,0% responden yang mempersepsikan pemilu sebagai sesuatu yang bermanfaat, tidak percaya bahwa kandidat yang dipilihnya mampu mewujudkan harapan. Bahkan 2,1% menyatakan sangat tidak percaya. Hampir sama dengan responden yang menganggap pemilu sangat bermanfaat, dari responden yang menyatakan pemilu bermanfaat ini, secara logis terdapat ketidakrunutan berpikir sebesar 21,1% responden.

Tidak berhenti pada responden yang menganggap positif terhadap kemanfaatan pemilu, data silang menunjukkan terjadinya ketidakrunutan pada responden yang menganggap negatif

terhadap kemanfaatan pemilu. Sebanyak 18, 8% responden yang mempersepsikan pemilu sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat, sangat percaya bahwa kandidat yang dipilihnya mampu mewujudkan harapan. Sebanyak 39, 6% responden yang mempersepsikan pemilu sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat, percaya bahwa kandidat yang dipilihnya mampu mewujudkan harapan. Sedangkan yang tidak percaya, sebanyak 41,7% responden. Artinya, bila ditotal, mayoritas responden (sekitar 58%) yang menganggap pemilu tidak bermanfaat, memiliki kepercayaan bahwa kandidat yang dipilihnya dapat mewujudkan harapan. Angka tersebut tentu sangat besar untuk sebuah ketidak konsistenan berpikir, dimana lazimnya responden yang menganggap pemilu tidak bermanfaat maka tidak percaya terpenuhinya harapan melalui pemilu.

KESIMPULAN

Data statistik di atas menunjukkan adanya ketidakcocokan persepsi terhadap konsep pemilu. Ketidakcocokan tersebut tercermin dalam hampir seperempat jumlah responden memaknai pemilu di luar konsep pemilu yang dikemukakan oleh para ilmuwan politik (seperti misal konsep yang disampaikan Wojtasik, 2013, dan Medvic, 2010).

Data statistik di atas juga menunjukkan adanya ketidakrunutan alur berpikir dalam memaknai pemilu bila merujuk pada konsep pemilu. Terdapat beberapa ketidakrunutan persepsi. Pertama, mayoritas responden yang memaknai pemilu di luar konsep para ilmuwan politik, justru menilai positif terhadap kemanfaatan pemilu. Ketidakrunutan tersebut tercermin

pada responden yang memaknai pemilu sebagai pembagian uang, pesta rakyat, dan pemborosan uang negara. Kedua, mayoritas responden yang memaknai pemilu di luar konsep para ilmuwan politik, justru memiliki harapan yang bersifat substantif dengan adanya pemilu. Ketidakrunutan tersebut juga tercermin pada responden yang memaknai pemilu sebagai pembagian uang, pesta rakyat, dan pemborosan uang negara. Ketiga, terdapat responden yang menilai positif terhadap kemanfaatan pemilu, namun menilai negatif terhadap kemampuan kandidat yang dipilihnya untuk memenuhi harapan. Meskipun angkanya tidak mayoritas, namun mencapai lebih dari 20% untuk masing-masing. Keempat, terdapat responden yang menilai negatif terhadap kemanfaatan pemilu, namun menilai positif terhadap kemampuan kandidat yang dipilihnya untuk memenuhi harapan. Meskipun angkanya tidak mayoritas, namun mencapai sekitar 18%.

Secara umum dapat dikatakan bahwa dengan mendiskusikan data dan konsep pemilu, terjadi anomali “arti penting” pemilu. Dengan mengkombinasikan variabel persepsi pemaknaan, kemanfaatan, harapan, dan kepercayaan, anomali “arti penting” tersebut berupa ketidakcocokan persepsi terhadap konsep, dan ketidakrunutan antar persepsi. Pelibatan beberapa variabel dalam mengungkap “arti penting” ini telah memperluas kajian arti penting yang dilakukan para peneliti sebelumnya. Sebagaimana disampaikan di bagian awal, terjadi perdebatan dan penyederhanaan kesimpulan arti penting. Dalam penelitian mereka, arti penting seringkali diwujudkan dalam pertanyaan, “apa arti penting

Vol.7, No.1, 2021
Doi: 10.24198/cosmogov.v7i1.29269
<http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/index>

pemilu?” atau, “apakah pemilu penting?”. Artikel ini memperluas pemahaman arti penting dengan menelusur persepsi pemaknaan, kemanfaatan, harapan, dan kepercayaan, dan hasilnya terjadi konflik dalam mempersepsikan arti penting pemilu.

Data yang tersaji dalam artikel ini bisa dianggap lain oleh pembaca. Seperti misal, “apakah ada kesalahan dalam survei?”, “apakah responden serius dalam menjawab?”, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang mempertanyakan kelayakan data, yang disebabkan adanya konflik jawaban

sebagaimana di atas. Anomali ini justru menunjukkan bahwa terdapat variabel lain yang tidak terekam dalam survei kami, yang mungkin dapat menjelaskan kenapa terjadi anomali tersebut, atau mungkin dapat menjelaskan bahwa ketidakcocokan dan ketidakrunutan persepsi responden bukan anomali. Hal itulah yang menjadi keterbatasan dari artikel ini, dan sekaligus peluang bagi kami dan para peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam tentang “arti penting” pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bellucci, Paolo. and Oliver Heath. (2007). *The Political Salience of Social Cleavages in Italy, 1963-2006*. Occasional Paper No. 18/2007. Siena, Italy: Center for the Study of Political Change.
- Birch S. (2001). “Elections”. Dalam P.B. Clarke, J. Fowleraker (ed.) *Encyclopedia of Democratic Thought*, New York: Routledge.
- Dalton R.J., Farrell D.M., McAllister I. (2011). *The Dynamics of Political Representation*. Dalam M. Rosema, B. Deters, K. Aarts (ed.), *How Democracy Works: Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies*, Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Dragu, T. C. and Fan, X. , (2016). "Issue Salience and Electoral Campaigns" Makalah Disajikan dalam the annual meeting of the American Political Science Association Annual Meeting, TBA, Philadelphia, PA
- Dye T.R., Schubert L., Zeigler H. (2009). *The Irony of Democracy: An Uncommon Introduction to American Politics*, Wadsworth: Cengage Learning.
- Epstein, L., & Segal, J. (2000). Measuring Issue Salience. *American Journal of Political Science*, 44(1), 66-83.
- Franklin, Mark N. (2001). “Electoral Participation.” Dalam Richard G. Niemi and Herbert F. Weisberg (ed). *Controversies in Voting Behavior*, 4th. Washington, DC: CQ Press
- Górecki , Maciej A. (2011). Electoral Salience and Vote Overreporting: Another Look at the Problem of Validity in Voter Turnout Studies. *International Journal of Public Opinion Research*, 23(4), 544–557
- Harrop M., Miller W.L. (1987). *Elections and Voters: A Comparative Introduction*, Basingstoke: Macmillan.
- Heywood A. (2000). *Key Concepts in Politics*, New York: Palgrave.
- Katz R.S. (1997). *Democracy and Elections*, Oxford: Oxford University Press;
- Katz R.S. (2000). “Function of elections”. Dalam R. Rose (ed.), *International encyclopedia of elections*, Washington: CQ Press.

- Key, O.V. (1966). *The Responsible Electorate: Rationality of Presidential Voting 1936–1960*, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- KPU Kabupaten Demak. (2019). Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Lee, D. S., Moretti, E., dan Butler, M. J. (2004). Do Voters Affect or Elect Policies? Evidence from the U. S. House. *The Quarterly Journal of Economics*, 119(3), 807–859.
- Medvic S.K. (2010). *Campaigns and Elections: Players and Processes*, Wadsworth: Cengage Learning.
- Murianews.com. (2019). Jumlah DPT Pati di Pileg dan Pilpres 2019 Bertambah.
<https://pasfmpati.com/radio/index.php/892-dps-pemilu-2019-di-pati-1-028-000-pemilih>.
- Orford, S., Rallings, C., Thrasher, M., & Borisjuk, G. (2009). Electoral Salience and the Costs of Voting at National, Sub-National and Supra-National Elections in the UK: A Case Study of Brent, UK. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 34(2), new series, 195-214.
- Rose R., Mossawir H. (1967). Voting and Elections: A Functional Analysis. *Political Studies*, 15(2), 173-201.
- Taylor, Shelley E. and Susan T. Fiske (1978). "Salience, Attention, and Attribution: Top of the Head Phenomena," Dalam L. Berkowitz, *Advances in Experimental Social Psychology*, Vol 2. New York: Academic Press, 249-288.
- Wlezien, Christopher. (2005). On the Salience of Political Issues: The Problem with 'Most Important Problem. *Electoral Studies*, 24(4). 555-579.
- Wojtasik, Waldemar. (2013). Functions of Elections in Democratic Systems. *Political Preferences*, 2013(4), 25-38

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Politik, Pemerintahan, dan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, yang telah mendukung terlaksananya penelitian bersama,, antara para peneliti di Universitas Brawijaya, dan para peneliti di School of Politics, Public Affairs & International Studies, University of Wyoming, USA.